

ABSTRAK

PERAN DEWAN KEAMANAN PBB MENURUT PIAGAM PBB DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK DI SUDAN SELATAN

Oleh

SUPRAYETNO

Pada Tanggal 9 Juli 2011 Sudan Selatan menjadi negara baru di dunia. Kelahiran Republik Sudan Selatan adalah puncak dari proses perdamaian enam tahun yang dimulai dengan penandatanganan Perjanjian Perdamaian Komprehensif (CPA) pada tanggal 9 Januari 2005 antara Pemerintah Sudan dan Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM), yang berakhir lebih dari 20 tahun perang. Setelah puluhan tahun perang saudara brutal yang menewaskan dua setengah juta orang mati, bagian selatan hancur dan jauh tertinggal dari Sudan. Kemerdekaan pada tahun 2011 merupakan awal negara termuda di dunia muncul di tengah tantangan yang besar. Memisahkan diri dari Sudan menandai tonggak utama dan kesempatan baru untuk Sudan Selatan. Tapi korupsi negara besar, ketidakstabilan politik dalam partai yang berkuasa, Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM), dan ketegangan terus-menerus terjadi dengan Sudan atas pembagian pendapatan minyak yang tersisa, sehingga Sudan Selatan sangat rentan terhadap konflik baru. Konflik baru muncul ketika Presiden Sudan Selatan memecat Wakil Presidennya Machar dan membubarkan kabinet pemerintahan. Pada tanggal 15 Desember 2013 ketegangan antara faksi-faksi yang setia kepada Presiden Salva Kiir, kelompok etnis Dinka, dan mereka yang selaras dengan mantan Wakil Presiden itu, Riek Machar, kelompok etnis the Nuer, meledak menjadi pertempuran di jalan-jalan ibu kota Juba. Sudan Selatan kembali berperang dan kembali masyarakat dilanda ketakutan sehingga terpisah dan meninggalkan ribuan orang mati yang tak terhitung jumlahnya. Hingga September 2014, 1,8 juta orang masih terlalu takut untuk kembali ke rumah mereka. Bahkan melalui misi kemanusiaan PBB telah memberikan bantuan kepada lebih dari 3,1 juta orang di Sudan Selatan. Mereka memperkirakan bahwa setidaknya 2,2 juta orang masih menghadapi kesulitan baik tingkat krisis atau darurat kerawanan pangan. Oleh karena itu Dewan Keamanan PBB bertindak atas Bab VII Piagam PBB memutuskan untuk ikut campur tangan dalam menyelesaikan perdamaian dan menjaga keamanan yang terjadi di Sudan Selatan dengan membentuk UNMISS pada tanggal 8 Juli 2011.

Penelitian ini membahas permasalahan tentang bagaimana peran Dewan Keamanan PBB di Sudan Selatan berdasarkan Piagam PBB dalam menjaga dan memelihara perdamaian dan keamanan di Sudan Selatan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bersumber pada sumber-sumber hukum internasional dan pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu mengumpulkan literatur-literatur, artikel-artikel dan bahan bacaan lainnya baik itu berasal dari buku, jurnal maupun internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DK PBB dalam menjalankan perannya di Sudan Selatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 Piagam PBB yang memiliki dua tugas pokok, telah menjalankan fungsi dan perannya.

Kata kunci : Peran, Dewan Keamanan PBB, Konflik internal, Sudan Selatan